KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Agrinas Diberi Mandat Jalankan KMP
Tanggal : Rabu, 01 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Agrinas Diberi Mandat Jalankan KMP

Penugasan Agrinas untuk menjalankan Koperasi Merah Putih selama dua tahun dinilai berisiko melanggar Undang-Undang Desa.

JAKARTA, KOMPAS — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) diberi mandat untuk menjalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama dua tahun. Selanjutnya, operasionalisasi akan diserahkan kepada desa.

"Untuk operasionalisasi awal Koperasi Merah Putih, pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara atau Agrinas selama dua tahun. Tujuannya adalah mempercepat pengaktifan dan pengisian usaha, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada wartawan seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) tentang Koperasi Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Mandat itu akan diatur dalam instruksi presiden (inpres) yang dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Saat ini sudah disiapkan.

Zulkifli menuturkan, Koperasi Merah Putih (KMP) akan menjalankan berbagai fungsi strategis di desa. Misalnya, agen elpiji, agen Bulog untuk penyaluran beras SPHP, serta agen pupuk subsidi. KMP juga akan menjadi *offtaker* atau penyerap hasil produksi petani, seperti gabah dan jagung. Hal ini terutama dilakukan jika harga di tingkat petani turun di bawah harga acuan Rp 6.500 per kilogram untuk saat ini.

KMP juga berperan sebagai penampung hasil produksi pertanian rakyat desa sekaligus pemasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah juga menyiapkan Koperasi Merah Putih sebagai tempat distribusi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan. Koperasi Merah Putih pun dirancang menjadi titik layanan pembayaran berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembayaran listrik PLN," katanya.

Menurut Zulkifli, sebanyak 3.505 unit KMP telah selesai dibangun. Sekitar 33.000 unit lainnya dalam proses pembangunan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga hadir dalam rakortas itu. Wartawan sempat bertanya bagaimana teknis pembagian tugas operasional KMP, misalnya siapa yang menjadi pengurus, anggota, atau pengawas di tingkat pusat selama dua tahun pertama operasionalisasi dipegang Agrinas. Yandri hanya mengatakan, Kementerian Koperasi, Agrinas, dan kementerian/lembaga lainnya nanti akan duduk bersama lagi.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, pihaknya siap menunggu inpres pengoperasian KMP dikeluarkan. Dia menekankan, selama dua tahun pertama, operasionalisasi KMP akan dijalankan Agrinas secara modern dan profesional, dengan dukungan digitalisasi serta tata kelola yang terbuka. Pengurus koperasi desa akan tetap dilibatkan sebagai pengawas, pengontrol, pengendali, dan pemantau.

Tidak ada ruang

Pemberian mandat kepada Agrinas untuk menjalankan KMP direspons negatif oleh sejumlah pihak. Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi menilai, penugasan Agrinas untuk mengoperasikan KMP selama dua tahun berisiko melanggar Undang-Undang Desa.

Desa tidak lagi benar-benar diberi ruang untuk menentukan nasib koperasi secara mandiri. Desa justru terkesan dipaksa membentuk koperasi. Sementara itu, kepala desa hanya menjadi pihak yang memberikan tanda tangan. Adapun penggunaan dana dan pelaksanaan program dijalankan oleh pihak lain.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Katalis Nusantara Lestari (Katal Foundation) Roy Salam memandang, adanya mandat baru untuk Agrinas bisa menimbulkan kebingungan. "Koperasi Merah Putih secara legal berbentuk koperasi, tetapi dalam praktiknya lebih menyerupai korporasi yang dikelola secara terpusat," katanya.

Sorotan juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koperasi Agung Sudjatmoko. Menurut dia, persepsi publik bakal terbelah setelah Agrinas diberi mandat mengoperasikan KMP selama dua tahun. Pro dan kontra akan muncul lagi.

"Belum lagi kebijakan penyeragaman bangunan dan operasionalisasi KMP secara konsep sulit diterima oleh akal sehat publik. Padahal, secara filosofis, koperasi dibangun anggota, menyelesaikan masalah mereka, serta berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggota," ucapnya.

Sebelumnya, pada Februari lalu muncul kontroversi terkait kebijakan impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk operasionalisasi KMP. Kebijakan itu ditentang sejumlah pihak karena dianggap tidak pro terhadap industri otomotif nasional.

Ketika itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor 105.000 mobil pikap dari India ditunda (*Kompas*, 24/2/2026). Meski demikian, diketahui beberapa hari kemudian bahwa sebanyak 1.200 mobil pikap impor dari India untuk KMP sudah masuk ke Indonesia.

Pikap India disalurkan

Menteri Koperasi Ferry Juliantono seusai halalbihalal di Jakarta, Senin (30/3), mengatakan, pikap yang diimpor dari India telah disalurkan secara bertahap ke koperasi yang sudah merampungkan pembangunan gerai fisik.

"Setiap kali ada bangunan Koperasi Merah Putih yang rampung dibangun beserta kelengkapan administrasinya, fasilitas kendaraan tersebut langsung disediakan," ujarnya.

Ke depan, Ferry melanjutkan, pemerintah akan memprioritaskan industri otomotif nasional untuk pengadaan kendaraan operasional KMP. Namun, jika kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, kekurangan pasokan akan dipenuhi dari impor.

Mengenai porsi antara kendaraan produksi nasional dan impor, pemerintah belum memerinci komposisinya. Pemerintah menyatakan akan menggunakan unit yang sudah tersedia lebih dulu untuk memenuhi pengadaan fasilitas kendaraan di setiap Koperasi Merah Putih.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, Selasa (31/3), mengungkapkan, impor kendaraan operasional KMP kemungkinan sulit dibentikan. Dia menduga sudah ada kontrak, uang muka, dan bisa jadi komitmen bisnis atau bahkan antarpemerintah yang mengikat.

"Jadi, meski secara ekonomi dan fiskal dinilai sebaiknya ditunda atau diperkecil, realitas politik dan kontraktual membuat ruang fiskal pemerintah semakin kaku dan tidak fleksibel," katanya. (MED)